

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Majalah Ilmiah :

Moh. Toha Solahuddin, *“Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”*, Parakatte, Edisi Triwulan III, Volume 26, Tahun 2016, Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, Makassar.

### Buku-buku :

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. 2005, *“Metode Penelitian”*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad. 2004, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah. 2008, *“Penegakan Hukum Lingkungan”*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Qirom Samsudin M, Sunaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tindakan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Waluyo. 2016, *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2008, *“Kebijakan Hukum Pidana”*, Prenada media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2011, *“Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2010, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Bonger. 1981, *“Pengantar Tentang Kriminologi”*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budhi Masthuri. 2005, *“Mengenal Ombudsman Indonesia”*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Eddy Soeryanto Soegoto. 2013, *“Marketing Research The Smart Way To Solve A Problem Book”*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Friedman L (penerjemah Mohammad Arifin). 1993, *“Teori dan Filsafat hukum, judul asli Legal Theory”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2007, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011, *“Pendidikan Anti Korupsi”*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.

*Normatif & Empiris”*, Pustaka Pelajaran, Yogyakarta. Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad. 2010 *“Dualisme Penelitian Hukum*

Muladi. 2002, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Universitas Diponegoro, Semarang

R. Wiyono. 2005, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 1996, *“Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme”*, Bina Cipta, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sidik Sunaryo. 2004, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Simanjuntak B dan Chairil Ali. 1980, *“Cakrawala Baru Kriminologi”*, Trasiito, Bandung.

Soedjono D. 1976, *“Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)”*, Alumni, Bandung.

Soedjono D. 1983, *“Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi”*, CV. Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.

Sudarto. 1977, *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung.

W.J.S Poerwodarminto. 1952, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2015, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2008, “*Sosiologi Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta

**Internet :**

<http://www.ombudsman.go.id/news/r/waspadai-modus-pungli-dan-potensi-korupsi>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak  
Pidana.

Peraturan Bupati Jepara No.40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan  
Fungsi Inspektorat Jepara.

